

Determinan Tingkat Kejahatan Properti (*Property Crime*) di Indonesia

Putri Yulianda Sukma¹, Joan Marta²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia

*Korespondensi: : yuliandaputri90@gmail.com, joan@fe.unp.ac.id

Info Artikel

Diterima:

05 Februari 2024

Disetujui:

23 Februari 2024

Terbit daring:

01 Maret 2024

DOI: -

Sitasi:

Yulianda, Putri, S & Marta, Joan (2024). Determinan Tingkat Kejahatan Properti (*Property Crime*) di Indonesia

Abstract:

This study aims to find out and analyze how the Determinants of Property Crime Rate in Indonesia. This research is an effort to add to the existing literature on property crime research in developing countries, especially Indonesia. The type of data used in this study is secondary data sourced from the Central Statistics Agency (BPS) which is grouped into two parts, namely the dependent variable namely Property Crime and the independent variable consisting of Population Density, Education Level, Unemployment, Income Inequality and Police Power. This study used descriptive and inductive analysis. This study uses panel data regression analysis using the Fixed Effect Model (FEM) method with cross section of 34 Provinces in Indonesia and time series 2018 – 2021. The findings in the results of this study revealed that the variables of population density, education level, unemployment and police strength had a significant effect however, on the variable of income inequality did not have a significant effect on the level of property crime in Indonesia.

Keywords : Overcrowding, crime, income inequality, policing power, education

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Determinan Tingkat Kejahatan Properti (*Property Crime*) di Indonesia. Penelitian ini merupakan upaya untuk menambah literatur yang ada tentang penelitian kejahatan properti di negara berkembang khususnya Indonesia. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu variabel dependent yakni Kejahatan Properti dan variabel independent yang terdiri atas Kepadatan Penduduk, Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan dan Kekuatan Kepolisian. Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan metode Fixed Effect Model (FEM) dengan cross section 34 Provinsi di Indonesia dan time series 2018 – 2021. Temuan pada hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pada variabel kepadatan penduduk, Tingkat pendidikan, Pengangguran dan Kekuatan Kepolisian berpengaruh signifikan namun, pada variabel ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kejahatan properti di Indonesia.

Kata kunci : Kepadatan Penduduk, Kejahatan, Ketimpangan Pendapatan, Kekuatan Kepolisian, Pendidikan.

Kode Klasifikasi JEL : O15, H75, Q56

PENDAHULUAN

Tindak kriminal atau kejahatan menjadi penyakit sosial diseluruh negara berkembang maupun negara maju yang hampir tidak ada akhirnya. Dalam mendorong perkembangan pembangunan nasional diiringi dengan pemerataan dalam kesejahteraan masyarakat diperlukan upaya maksimal terhadap beberapa penyebab yang dapat meningkatnya angka kejahatan yang dapat merugikan masyarakat dari segi harta benda maupun nyawa korban.

Kejahatan terhadap harta benda atau kejahatan properti menjadi kasus kejahatan dengan jumlah paling banyak pada setiap tahunnya. Sumber daya yang tersedia yang dapat meminimumkan kejahatan properti masih bersifat langka dan terbatas. Oleh karena itu, sumber daya tersebut harus dioptimalkan agar bisa mencapai tingkat kejahatan properti yang serendah-rendahnya (Becker, 1968).

Di era Globalisasi saat ini dengan perkembangan teknologi dan informasi yang berkembang dengan pesat memberikan dampak positif bagi masyarakat, namun tidak lain hal dengan dampak negatif oleh budaya asing yang dengan mudah masuk ke dalam negeri. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya tindakan kejahatan properti karena karakteristik sosial dan budaya yang berbeda,

Tingginya kebutuhan hidup yang tidak diimbangi dengan skill dan pendapatan yang tidak memadai membuat seseorang sangat berambisi memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara apapun, kondisi ini yang memicu timbulnya tindak kejahatan properti yang bertujuan merampas harta korban dan menimbulkan kerugian. (Purwanti & Widyaningsih, 2019). Kejahatan properti merupakan salah satu jenis kegiatan ekonomi karena para pelaku yang melakukan kejahatan mempertimbangkan biaya dan manfaat sebelum melakukan tindak kejahatan, menurut kriminolog dan ekonom, kejahatan dapat terjadi dikarenakan distribusi aset sepihak.

Kejahatan menjadi suatu permasalahan yang kompleks yang menjadi konsekuensi bagi pemerintah, aparat penegak hukum dan terutama bagi masyarakat suatu daerah. Kasus kejahatan konvensional yang menjadi gangguan keamanan dan mengancam kesejahteraan masyarakat yaitu kejahatan properti yang dapat diuraikan menjadi beberapa sifatnya berupa pencurian, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan, pengrusakan/penghancuran barang, dan penadahan. (Imran et al., 2018).

Kejahatan Properti yang terjadi di Indonesia yang memiliki tindak kejahatan tertinggi dan patut untuk diwaspadai yaitu pencurian dengan pemberatan, Tindak kejahatan ini pada tahun 2018 menjadi jenis tindak kejahatan dengan kasus tertinggi bila dibandingkan dengan jenis kejahatan lainnya. Kejahatan pencurian dengan pemberatan mencapai 31.571 kasus pada tahun 2018. Tindak kejahatan ini berhasil mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2018 sampai 2021. Jenis kejahatan pembakaran dengan sengaja pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan dengan total menjadi 715 kasus

Pesatnya perkembangan di daerah perkotaan tentu akan memberikan keuntungan perekonomian bagi penduduknya. Daerah yang berkembang dengan pesat tentu akan berdampak pada pola pikir penduduk untuk hijrah ke daerah tersebut yang akan menyebabkan terjadinya kepadatan penduduk. Kepadatan pendudukan memiliki pengaruh terhadap kualitas hidup, peningkatan kualitas hidup akan sulit untuk ditingkatkan dengan wilayah kepadatan penduduk yang tinggi. Untuk melihat kualitas hidup terdapat tiga standar yang digunakan yaitu kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup hayati, manusiawi dan kebutuhan dasar untuk memilih.

Sebagian besar penduduk berdomisili di kota-kota besar, untuk memenuhi standar kebutuhan hidup. Semakin padat penduduk yang tinggal di suatu daerah, maka akan semakin sedikit kesempatan untuk mereka mendapatkan lapangan pekerjaan dan terjadi ketimpangan ekonomi. Semakin banyaknya penduduk yang mengalami permasalahan ekonomi seperti pengangguran, ketimpangan pendapatan antara tenaga kerja bekerja dengan tidak bekerja dan kurangnya kesejahteraan masyarakat akan rentan terhadap meningkatnya kejahatan.

Tindak kejahatan atau kriminalitas diyakini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kepadatan penduduk, tingkat pendidikan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan serta

bagaimana pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak kejahatan. Pesatnya perkembangan di daerah perkotaan tentu akan memberikan keuntungan perekonomian bagi penduduknya. Daerah yang berkembang dengan pesat tentu akan berdampak pada pola pikir penduduk untuk hijrah ke daerah tersebut yang akan menyebabkan terjadinya kepadatan penduduk.

Kepadatan pendudukan memiliki pengaruh terhadap kualitas hidup, peningkatan kualitas hidup akan sulit untuk ditingkatkan dengan wilayah kepadatan penduduk yang tinggi. Analisis kejahatan properti dapat dilaksanakan dengan pendekatan ekonomi kejahatan. Pendekatan ekonomi juga bisa dilihat dari rasionalitas pelaku kejahatan yang lebih memilih melakukan tindak kriminal di daerah perkotaan dibandingkan di desa. Hal ini didorong oleh beberapa faktor salah satunya yaitu tingginya pendapatan yang dimiliki masyarakat di kota memungkinkan peluang lebih tingginya keuntungan aksi kejahatan (harta benda korban) di kota, rendahnya probabilitas tertangkap di kota dikarenakan padatnya penduduk di daerah perkotaan.

Menurut Pritana (2015) Keterbatasan dalam mengenyam pendidikan yang lebih tinggi memberikan dampak negatif bagi seseorang yakni lapangan pekerjaan yang sempit. Sehingga mengakibatkan mereka yang memiliki pendidikan rendah sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Dengan hal tersebut maka seseorang akan melakukan kegiatan ilegal demi memenuhi pemuas kebutuhan. Jika penduduk tidak dapat memperoleh pekerjaan maka akan menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran.

Menurut (Khan et al., 2015) mengemukakan bahwa penurunan penghasilan ketika tingkat pengangguran yang tinggi di suatu negara dapat mendominasi individu mengadopsi perilaku kejahatan. Desakan untuk memenuhi kebutuhan disaat seseorang menganggur atau tidak memiliki pekerjaan akan memicu peluang seseorang untuk memilih melakukan kegiatan ilegal yang dapat menghasilkan pendapatan. Berkurangnya tingkat pengangguran secara tidak langsung memberikan gambaran berkurangnya kemungkinan seseorang dalam melakukan tindak kriminal. Namun pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Mempunyai pekerjaan atau berhasil mendapatkan pendapatan yang legal tidak membuat seseorang untuk tidak melakukan tindak kriminal.

Lochner dan Moretti (2004) menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dapat mengalami penurunan dengan pendidikan melalui preferensi atau saluran pendapatan. Pendidikan meningkatkan pola pikir individu dengan enggan terhadap perilaku yang berisiko dan ilegal serta meningkatkan biaya peluang kejahatan dengan menghasilkan pendapatan potensial yang tinggi dari kegiatan yang tidak merugikan masyarakat serta melanggar norma hukum.

Secara teoritis, pelaku kejahatan akan menanggapi terhadap insentif kejahatan dengan mempertimbangkan rasionalitas. Kondisi kesenjangan dalam suatu wilayah akan cenderung mendorong keputusan seseorang untuk memilih melakukan tindak kejahatan. Hal ini dikarenakan pelaku kejahatan berhadapan langsung dengan korban potensial yang mempersiapkan ekspetasi perolehan dari harta rampasan yang lebih tinggi dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup lebih dari yang dibutuhkan.

Selain itu, faktor yang mendorong individu untuk memilih melakukan tindakan kejahatan properti adalah dikarenakan pendapatan. Pendapatan yang masih rendah didapatkan sehingga hal tersebut mendorong individu memilih jalan yang lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa memikirkan biaya yang harus dikeluarkan dan berasumsi bahwa dengan melakukan tindakan kejahatan dan mendapatkan pendapatan ilegal yang lebih besar dan kepuasan lebih. Namun tidak memikirkan resiko yang mungkin didapatkan apabila tertangkap tanpa mempertimbangkan utilitas yang hilang selama dalam penjara atau dalam masa hukuman. Seperti yang telah diteliti oleh (Florentinus Nugro Hardianto, 2009).

Dalam meminimumkan tingkat kejahatan properti, insentif tindak kejahatan harus diturunkan dengan meningkatkan biayanya atau menurunkan nilai harapan dari tindak kejahatan tersebut dengan memperluas probabilitas tertangkap. Oleh karenanya kekuatan kepolisian dalam mengupayakan keamanan masyarakat dan upaya dalam menyelesaikan kasus dari tindakan kejahatan yang dilaporkan masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku diduga berpengaruh terhadap kejahatan. Pelaku tindak kejahatan akan kembali mempertimbangkan wilayah yang ingin dilakukan tindak kejahatan dengan kapasitas kekuatan dari aparat penegak hukum maupun dalam menjaga keamanan

Berdasarkan pada latar belakang yang telah di uraikan di atas, penelitian ini di tujukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepadatan penduduk, tingkat pendidikan, pengangguran, ketimpangan pendapatan dan kekuatan kepolisian terhadap kejahatan properti di Indonesia, maka penulis tertarik untuk mengkaji faktor kejahatan di Indonesia yang berjudul “Determinan Tingkat Kejahatan Properti (Property Crime) di Indonesia”.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan saat ini bertempat di Indonesia, yaitu pada tiga puluh empat provinsi di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data panel yang merupakan gabungan dari data runtut waktu (*Time Series*) dengan data silang tempat (*Cross Section*) yang diperoleh dari Lembaga resmi dan instansi terkait atau data yang sudah diolah oleh pihak kedua, misalnya diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang didapatkan dari mengakses website lembaga yang bersangkutan.

Pada dasarnya bentuk persamaan atau model regresi panel dapat dibentuk pada persamaan umum. Model yang dipakai dalam analisis data panel adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Log}X_{1it} + \beta_2 \text{Log}X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \mu_i \quad (1)$$

Dimana, Y_{it} adalah Kejahatan properti di Indonesia, X_{1i} adalah Penduduk, X_{2it} adalah Tingkat Pendidikan, X_{3it} adalah Tingkat Pengangguran, X_{4it} adalah Ketimpangan Pendapatan, X_{5it} adalah Kekuatan Kepolisian/Jumlah Kasus, $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ adalah Elastisitas Variabel Bebas, I adalah Cross Section, t adalah Time Series, μ_{it} adalah Error Term.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rata-rata kepadatan penduduk sebesar 740,05% dengan standar deviasi sebesar 2666,00% dan koefisien variasi yang diperoleh sebesar 360,13%. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 15887,25 jiwa/km². Hal ini disebabkan karena Provinsi DKI Jakarta merupakan Ibu Kota Negara Indonesia yang merupakan pusat dari segala kegiatan perekonomian.

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator dalam menentukan tingkat pendidikan yang mana akan menunjukkan rata-rata jumlah tahun yang diselesaikan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenjang pendidikan formal yang sedang dijalani. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, maka kemampuan dan kualitas pola pikir masyarakat akan semakin meningkat sehingga dapat membentuk sumber daya manusia yang baik dan dapat meningkatkan kualitas perekonomian di suatu negara.

Tingkat pengangguran terbuka di 34 Provinsi di Indonesia setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Rata-rata tingkat pengangguran sebesar 4,73% dengan standar deviasi sebesar 1,65% dan koefisien variasi yang diperoleh sebesar 35,10%. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi berada di Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 10,12%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 kasus pandemi Covid-19 masih tinggi, sehingga menyebabkan para pekerja di PHK dan tidak mendapatkan pekerjaan lagi.

Selain itu sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau juga terhenti karena pandemi Covid-19 tersebut. Ketimpangan pendapatan di 34 Provinsi di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Rata-rata tingkat ketimpangan pendapatan sebesar 0,35% dengan standar deviasi sebesar 0,04% dan koefisien variasi yang diperoleh sebesar 10,44%. Tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi berada di Provinsi Yogyakarta yaitu sebesar 0,441%.

Pengujian Model dan Analisis Statistik

Dalam menentukan metode estimasi model regresi panel, dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan model yaitu *common effect model*, *fixed effect model* dan *random effect model*. Untuk memastikan kelayakan hasil estimasi model regresi panel data memerlukan beberapa pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah layak atau tidak untuk bisa dianalisis lebih lanjut.

Terdapat tiga tahap yang harus dilakukan untuk menentukan pemilihan model. Uji *Chow Test*, uji ini dilakukan untuk mengetahui pemilihan model yang digunakan yaitu antara *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model*. Untuk memilih model yang tepat untuk digunakan yaitu antara *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model* maka dilakukan Uji Hausman. Dan Uji Lagrange Multiplier dilakukan dengan tujuan menentukan pemilihan model antara *Common Effect* atau *Random Effect*.

Untuk Pengujian hipotesis penelitian ini selanjutnya dilakukan uji hipotesis statistik yaitu uji t dan uji F. Selanjutnya untuk dapat mengetahui *goodness of fit* dari hasil estimasi persamaan regresi yang dilakukan dan sebagai pertimbangan menentukan pilihan hasil estimasi terbaik digunakan koefisien determinasi R^2 .

Uji regresi panel digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam bentuk data *time series*. Dalam penelitian ini Uji *Chow* mendapatkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari taraf nyata sehingga dari hasil ini model yang terpilih adalah model *fixed effect*. Karena model yang terpilih adalah *fixed effect* maka dilakukan uji hausman untuk menentukan model terbaik antara *random effect* atau *fixed effect*. Hasil uji hausman menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari taraf nyata sehingga model yang terpilih adalah model *fixed effect*. Berdasarkan hasil dari uji *chow* dan uji hausman model terbaik yang terpilih adalah *fixed effect model*.

Berdasarkan hasil regresi estimasi *Fixed Effect Model* menunjukkan bahwa 4 dari variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap tingkat kejahatan properti di Indonesia yaitu variabel kepadatan penduduk, tingkat pendidikan, pengangguran dan kekuatan kepolisian sedangkan pada variabel ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh signifikan. Hasil Uji Regresi *Fixed Effect Model* diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$KJP = 2318885 - 152715,3(\text{LOG_KP}) - 711091,7(\text{LOG_TP}) + 9579,605(P) + 53004,05(KTP) - 633,8778(KK) \quad (2)$$

Berdasarkan hasil uji regresi diatas bahwa variabel Kepadatan Penduduk memiliki nilai koefisien regresi sebesar -152715,3. Hal ini berarti apabila variabel Kepadatan Penduduk meningkat sebesar satu persen, maka tingkat Kejahatan Properti akan menurun sebesar 152715,3 per 100.000 penduduk dengan asumsi variabel lain bernilai nol atau tetap.

Pada hasil uji regresi terlihat bahwa variabel Tingkat Pendidikan memiliki nilai koefisien regresi sebesar -711091,7. Hal ini berarti apabila variabel Tingkat Pendidikan secara rata-rata meningkat sebesar satu persen, maka tingkat Kejahatan Properti akan menurun sebesar 711091,7 per 100.000 penduduk dengan asumsi variabel lain bernilai nol atau tetap.

Tabel 1. Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Dependent Variable: Kejahatan Properti

Method: Panel Least Squares

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 136

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2318885	483984.9	4.791234	0.0000
Kepadatan Penduduk (KP)	-152715.3	64600.08	-2.364011	0.0201
Tingkat Pendidikan (TP)	-711091.7	173710.6	-4.093543	0.0001
Pengangguran (P)	9579.605	3566.919	2.685680	0.0085
Ketimpangan Pendapatan (KTP)	53004.05	352233.0	0.150480	0.8807
Kekuatan Kepolisian (KK)	-633.8778	214.5654	-2.954240	0.0039
Effect Specification				
Cross-section Fixed (dummy variables)				
Root MSE	20677.63	R-squared		0.610515
Mean dependent var	35034.37	Adjusted R-squared		0.457934
S.D dependent var	33255.09	S.E. of regression		24484.11
Akaike info criterion	23.28502	Sum squared resid		5.81E+10
Schwarz criterion	24.12027	Log likelihood		-1544.381
Hannan-Quinn Criter.	23.62444	F-statistic		4.001238
Durbin-Watson stat	3.127451	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber : Hasil Olahan EViews 12

Pada hasil uji regresi terlihat bahwa variabel Pengangguran memiliki nilai koefisien regresi sebesar 9579,605. Hal ini berarti apabila variabel Pengangguran meningkat sebesar satu persen, maka tingkat Kejahatan Properti akan meningkat sebesar 9579,605 per 100.000 penduduk dengan asumsi variabel lain bernilai nol atau tetap.

Pada hasil uji regresi terlihat bahwa variabel Ketimpangan Pendapatan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 53004,05. Hal ini berarti apabila variabel Ketimpangan Pendapatan meningkat sebesar satu persen, maka tingkat Kejahatan Properti akan meningkat sebesar 53004,05 per 100.000 penduduk dengan asumsi variabel lain bernilai nol atau tetap.

Pada hasil uji regresi terlihat bahwa variabel Kekuatan Kepolisian memiliki nilai koefisien regresi sebesar -633,8778. Hal ini berarti apabila variabel Kekuatan Kepolisian meningkat sebesar satu persen, maka tingkat Kejahatan Properti akan menurun sebesar 633,8778 per 100.000 penduduk dengan asumsi variabel lain bernilai nol atau tetap.

Determinan Kejahatan Properti di Indonesia.

Dari hasil estimasi diketahui, kepadatan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kejahatan properti di Indonesia. Artinya apabila kepadatan penduduk meningkat maka kejahatan properti di Indonesia akan menurun dan apabila kepadatan penduduk menurun maka kejahatan properti di Indonesia juga akan meningkat. Berdasarkan hasil

penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kejahatan properti di Indonesia. Artinya apabila tingkat pendidikan meningkat maka kejahatan properti di Indonesia akan menurun dan apabila tingkat pendidikan menurun maka kejahatan properti di Indonesia juga meningkat.

Secara teori penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Gary Becker (lantip prasojo, 2017) tentang *Human Capital Theory* atau disebut sebagai modal manusia dalam bukunya yang berjudul *Human Capital*. Menurut teori *Human Capital* perekonomian akan menjadi lebih tumbuh tergantung kualitas dari manusia. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kejahatan properti di Indonesia. Artinya apabila pengangguran meningkat maka kejahatan properti di Indonesia akan meningkat dan apabila pengangguran menurun maka kejahatan properti di Indonesia juga menurun. Secara teori penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Sukirno, 2006) bahwa pengangguran berdampak buruk terhadap kegiatan perekonomian yang menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik yang diakibatkan oleh pengangguran.

Ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kejahatan properti di Indonesia. Dapat diartikan bahwa, apabila di suatu daerah mengalami ketimpangan yang meningkat maka jumlah kejahatan juga akan mengalami peningkatan. Dan sebaliknya, apabila ketimpangan pendapatan rendah pada suatu daerah maka tingkat kejahatan properti juga akan rendah. Secara teori penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Becker (Kang, 2016) mengemukakan bahwa ketimpangan pendapatan menghubungkan orang-orang dengan upah rendah menurut Undang-Undang yang mempunyai tingkat kekayaan lebih tinggi di wilayah tersebut. Hal ini berpotensi terulangnya kejahatan di daerah tersebut dan kejahatan juga akan meningkat.

Kekuatan kepolisian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kejahatan properti di Indonesia. Artinya apabila kekuatan kepolisian meningkat maka kejahatan properti di Indonesia akan menurun dan apabila kekuatan kepolisian menurun maka kejahatan properti di Indonesia juga meningkat. Secara teori penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Levitt, 2004) yang menjelaskan bahwa beberapa faktor yang dapat menurunkan tingkat kejahatan di Amerika Serikat pada tahun 1990an salah satunya yaitu penambahan jumlah polisi. Penurunan kejahatan di Amerika Serikat pada tahun 1990an dengan penambahan jumlah polisi sebesar 10 sampai 20 persen terjadi penurunan angka kejahatan dengan peningkatan jumlah penyelesaian kasus yang berhasil diselesaikan. Jumlah polisi pada suatu wilayah dapat menjadi benteng terhadap peluang terjadinya tindakan kejahatan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan, didapatkan kesimpulan. Kepadatan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kejahatan properti di Indonesia. Artinya apabila kepadatan penduduk meningkat maka kejahatan properti di Indonesia akan menurun dan apabila kepadatan penduduk menurun maka kejahatan properti di Indonesia juga akan meningkat. Tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kejahatan properti di Indonesia. Artinya apabila tingkat pendidikan meningkat maka kejahatan properti di Indonesia akan menurun dan apabila tingkat pendidikan menurun maka kejahatan properti di Indonesia juga meningkat. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kejahatan properti di Indonesia. Artinya apabila pengangguran meningkat maka kejahatan properti di Indonesia akan meningkat dan apabila pengangguran menurun maka kejahatan properti di Indonesia juga menurun. Ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kejahatan properti di Indonesia. Artinya apabila ketimpangan di suatu daerah meningkat maka tingkat kejahatan properti akan mengalami peningkatan. Kekuatan kepolisian berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap kejahatan properti di Indonesia. Artinya apabila kekuatan kepolisian meningkat maka kejahatan properti di Indonesia akan menurun dan apabila kekuatan kepolisian menurun maka kejahatan properti di Indonesia akan meningkat. Disarankan kepada pemerintah untuk menjalankan program pemerataan pembangunan, pemerataan penyebaran penduduk dengan maksimal agar tidak terjadinya kepadatan penduduk yang hanya berada pada daerah tertentu saja yang dapat mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat. Disarankan kepada pemerintah untuk menambah infrastruktur pendidikan, menambah program beasiswa bagi masyarakat yang miskin agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi, sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan tidak melakukan tindak kejahatan yang merugikan orang lain

DAFTAR RUJUKAN

- Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. *The Journal of Political Economy*. Vol. 76, No. 2, The University of Chicago, USA.
- Fajri, R. E., & Rizki, C. Z. (2019). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk dan pengangguran terhadap kriminalitas perkotaan Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 4(3), 255–263.
- Florentinus Nugro Hardianto. (2009). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Indonesia Dari Pendekatan Ekonomi. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Indonesia Dari Pendekatan Ekonomi*, 13(2), 28–41.
- Hjalmarsson, R. (2008). Criminal justice involvement and high school completion. *Journal of Urban Economics*, 63(2), 613–630. <https://doi.org/10.1016/j.jue.2007.04.003>
- Imran, M., Hosen, M., & Chowdhury, M. A. F. (2018). Does poverty lead to crime? Evidence from the United States of America. *International Journal of Social Economics*, 45(10), 1424–1438. <https://doi.org/10.1108/IJSE-04-2017-0167>
- Kang, S. (2016). Inequality and crime revisited: effects of local inequality and economic segregation on crime. *Journal of Population Economics*, 29(2), 593–626. <https://doi.org/10.1007/s00148-015-0579-3>
- Khan, N., Ahmed, J., Nawaz, M., & Zaman, K. (2015). The Socio-Economic Determinants of Crime in Pakistan: New Evidence on an Old Debate. *Arab Economic and Business Journal*, 10(2), 73–81. <https://doi.org/10.1016/j.aebj.2015.01.001>
- lantip prasojo. (2017). *manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan*. uny press.
- Levitt, S. D. (2004). Understanding why crime fell in the 1990s: Four factors that explain the decline and six that do not. *Journal of Economic Perspectives*, 18(1), 163–190. <https://doi.org/10.1257/089533004773563485>
- Lochner. (2004). *The Impact of Education on Crime : International Evidence*. amerika.
- Nadilla, U., & Farlian, T. (2018). Pengaruh PDRB Perkapita, Pendidikan, Pengangguran, dan Jumlah Polisi Terhadap Kriminalitas di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 110–118.
- O’Sullivan, A. (2012). *Urban Economics : Eighth Edition*. Department of Economics, Lewis & Clark College. USA.
- Purwanti, E. Y., & Widyaningsih, E. (2019). Analisis Faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Kriminalitas Di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 9(2). <https://doi.org/10.35448/jequ.v2i2.7165>
- Rahman, Y. A., & Prasetyo, A. D. (2018). Economics and Crime Rates in Indonesia. *Jejak*, 11(2), 401–412. <https://doi.org/10.15294/jejak.v11i2.16060>
- Sukirno. (2006). *Teori Pengantar Makro Ekonomi*. rajawali grafindo.
- van Velthoven, B., & van Wijck, P. (2016). Becker’s theory on crime and punishment, a useful guide for law enforcement policy in The Netherlands? *Recht Der Werkelijkheid*, 37(1), 6–31. <https://doi.org/10.5553/rdw/138064242016037001002>